

MAKALAH

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UJIAN NASIONAL
(UN)



OLEH :

SULASTRI, S. PD., M. PD.

NIP. 19811001 200812 2 004

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada penulis untuk menyelesaikan makalah yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Ujian Nasional (UN).

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak memberikan masukan dalam pembuatan makalah ini. Dalam penulisan tugas ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pihak-pihak lain dan teman-teman untuk menuju kesempurnaan tulisan ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 27 Desember 2013

Sulastri, S. Pd., M. Pd.

Nip. 19811001 200812 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak pernah berhenti. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Beragam program inovatif ikut serta memeriahkan reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan seperti yang dinyatakan oleh Murphy dalam Majid (2006:3) adalah restrukturisasi pendidikan, yakni memperbaiki pola hubungan sekolah dengan lingkungannya dan dengan pemerintah, pola pengembangan perencanaan serta pola mengembangkan manajerialnya, pemberdayaan guru dan restrukturisasi model-model pembelajaran.

Menyikapi problematika tentang pendidikan nasional, khususnya kebijakan Ujian Nasional (UN) masih menyisakan permasalahan. Belum semua kalangan mampu menerima UN sebagai salah satu penentu standar kelulusan siswa. Bila kita lihat banyak masalah timbul dari segi penerapan pembelajaran, yang sesuai dengan tujuan UN tersebut. Penerapan UN lebih banyak mengarah pada bidang akademik saja dan belum merambah pada segi-segi lain. Berikut beberapa petikan yang menyatakan pendidikan itu bukan hanya dilihat dari sudut akademik semata.

1. Menurut pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Pasal 31 Ayat 3 mengarahkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia.
2. Menurut UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Meskipun sesuai dengan Peraturan Menteri No. 45 tahun 2006, pasal 3 tentang UN dinyatakan bahwa menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan yang hanya menciptakan kemampuan intelektual tanpa membangkitkan hati nurani akan menghasilkan manusia yang rapuh dan jiwa yang hampa dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata. Pendidikan yang diharapkan harus memiliki "ruh" yang mengembangkan nilai-nilai bijak, dan mengarahkan pada kecerdasan intelektual/akademik atau Intelligence Quotient (IQ), kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ), dan kecerdasan spiritual atau Spiritual Quotient (SQ).

EQ dan SQ sangat berperan dalam menunjang keberhasilan seseorang dalam perjuangan hidupnya. Kearifan untuk mengendalikan emosi justru akan menunjang bekerjanya nalar dan intelektual. EQ akan membangun motivasi, empati, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, sifat simpatik, solidaritas, dan intraksi sosial yang tinggi. Sementara SQ akan membimbing suara hati yang jernih yang mengarahkan kepada al napsu al matmainah, berani menghadapi hidup dengan optimisme, kreatif, fleksibel, dan visioner, serta memberikan kekuatan moral, memberikan kepastian jawaban tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, dan bertanggung jawab hidup dan lingkungannya. Kesemuanya itu akan mewujudkan kemampuan mengubah hambatan menjadi peluang dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Hal itu dikenal dengan istilah Adversity Quotient (AQ).

Segala permasalahan yang ada di Indonesia ini menunjukkan pendidikan kita belum berjalan dengan lancar. Budaya yang hanya menerima tanpa mau berusaha merupakan dampak dari metode pembelajaran sebelumnya. Sehingga membentuk manusia-manusia yang kurang kreatif.

Bila kita telusuri terjadinya pra kontra UN ini dikarenakan;

1. Adanya penyimpangan antara target pengajaran yang diharapkan dengan pelaksanaan proses belajar di sekolah.
2. Kriteria kelulusan yang distandarkan.
3. Fasilitas yang dibutuhkan guru,
4. Tingkat kemampuan profesional guru
5. Posisi guru yang terpinggirkan dan tersisihkan
6. Wujud kesejahteraan guru
7. Belum terpahaminya pengertian tentang evaluasi secara utuh oleh guru

Permasalahan lain yang dapat kita liat adalah UN telah mengabaikan proses pendidikan dan materi ajaran yang diberikan selama tiga tahun. Ironisnya, siswa yang berprestasi belajarnya baik dari kelas I-III dan sudah mendapat tawaran masuk perguruan tinggi tanpa tes, namun ketika siswa tersebut tidak lulus UN, maka juga tidak jadi diterima di perguruan tinggi tersebut. Itu mengindikasikan bahwa UN menjadi segala-galanya, dan mengabaikan prestasi di sekolah selama 3 tahun.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas ada beberapa hal yang harus jadi perhatian diantaranya; adanya keyakinan bahwa UN akan dapat mendorong kualitas etos belajar, UN akan memaksa belajar keras dan menumbuhkan etos kerja kerjas dan juga pernyataan bahwa anak yang tidak lulus UN sebagai anak yang masalah. Pernyataan-pernyataan ini tidak diragukan kebenarannya, karena terlalu berlebihan dalam memposisikan UN, seolah-olah tujuan pendidikan hanya untuk lulus UN. Padahal sudah jelas, tujuan pendidikan seperti yang telah disebutkan bukan hanya lulus UN walaupun ada manfaatnya tetapi tidak menentukan segalanya.

Bila melihat pada budaya bangsa Indonesia yang sebagian besar kurang mau untuk kreatif akan sulit untuk menghasilkan manusia yang memiliki multi talenta ataupun kompetensi.

BAB II

PEMBAHASAN

Tentunya tanpa perubahan yang sistematis dan mendasar, bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dalam sector pendidikan. Pergerakan system pendidikan kita yang lambat juga disebabkan oleh terlalu banyaknya yang dibicarakan, tapi tidak terkait dengan substansi pendidikan sendiri.

Agar pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan falsafah Negara kita maka perlu pembenahan dalam berbagai sector. Memajukan aspek pendidikan harus dilihat dari berbagai sudut pandang; ekonomi, social, budaya, hukum dan aspek lainnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Manan (1989:7) bahwa konsep kebudayaan dapat pula dipakai untuk mengkaji pendidikan karena dalam arti luas pendidikan adalah proses pembudayaan melalui mana masing-masing anak, yang dilahirkan dengan potensi belajar yang lebih besar dari makhluk menyusui lainnya, dibentuk menjadi anggota penuh dari suatu masyarakat, menghaati dan mengamalkan bersama-sama anggota-anggota lainnya suatu kebudayaan tertentu.

Pendidikan dapat dipakai sebagai proses penyampaian kebudayaan, didalamnya termasuk keterampilan, pengetahuan, sikap-sikap dan nilai-nilai serta pola-pola perilaku tertentu. Atau pendidikan dapat dikatakan sebagai *the transmission of culture*.

Berikut ini beberapa langkah yang dapat ***digunakan untuk mendukung terlaksananya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan UN*** yang professional yaitu:

A. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram tidak cukup berlangsung hanya secara incidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditindak-lanjuti dengan menyebarkan buku panduan kepada sekolah-sekolah.

Dalam hubungan ini pelaksanaan pendidikan kesenian perlu diberi perhatian khusus sehingga tidak menjadi pelajaran yang dikesampingkan.

- B. Pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesanggupan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian insentif guru.
- C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi.
Oleh karena itu, perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenis kegiatannya.
- D. Pendidikan tenaga kependidikan (prajabatan dan dalam jabatan) perlu diberikan perhatian khusus, oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Perlu lebih dikembangkan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai model pengembangan kemampuan guru (*self sustaining competencies*). Pendayagunaan sumber belajar yang beraneka ragam perlu ditingkatkan. Upaya ini menjadi tanggung jawab kepala sekola, guru dan teknisi sumber belajar.
- E. Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan factor penunjang dan utamanya factor penghambatnya (Tirtarahardja, 2005:257)

Selain itu peran aktif guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran turut memberikan dampak yang luar biasa dalam mewujudkan UN sebagai sarana penilaian yang tidak hanya bernuansa nilai akademik. Seperti yang dikemukakan oleh Sagala (2003:142) bahwa guru sebagai perencana pembelajaran, sering mengabaikan tuntutan atas layanan yang diperlukan,

peralatan tertentu, ruangan tertentu, jumlah anggaran yang tersedia, bantuan profesional, dan bantuan teknis yang harus ada pada waktu yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran maka guru perlu:

1. Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran.
2. Membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran.
3. Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran.
4. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran,
5. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berikut langkah-langkah pengembangan desain pembelajaran yang dapat juga digunakan guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang baik yaitu;

1. Spesifikasi asumsi atau preposisi yang mendasar, dimana program pembelajaran harus didasarkan pada asumsi yang jelas. Dengan berbagai macam teori pengembangan kurikulum perlu diadakan diskusi dalam menyusun program yang betul-betul aktual.
2. Mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan. Untuk mengetahui keluasan dan ke dalam cakupan kemampuan dasar, dapat digunakan jaringan topik/tema/konsep. Untuk mengidentifikasi kompetensi kita dapat menggunakan model pendekatan analisis tugas, pendekatan yang memusatkan pada kebutuhan siswa di sekolah, pendekatan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
3. Dengan melakukan identifikasi terhadap kompetensi-kompetensi yang diharapkan maka perlu digambarkan secara spesifik kompetensi-

kompetensi yang telah digariskan tersebut. Selain itu perlu juga dipertimbangkan apa kira-kira yang akan menjadi faktor penghambatnya dan waktu pelaksanaannya.

4. Perlu ditentukan jenis penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi. Penilaian ini akan menjadi acuan untuk melihat sejauh mana kompetensi yang telah dimiliki siswa.
5. Perlu dilakukan pengelompokan dan penyusunan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dikoordinasi sehingga dapat tercapai pada waktu yang telah ditetapkan
6. Langkah selanjutnya adalah penyusunan desain strategi pembelajaran. Program ini bertalian dengan kompetensi yang telah dirumuskan dan secara logis dikembangkan setelah kompetensi ditentukan.
7. Program-program yang telah didesain perlu di kelola dengan baik, setelah itu dilaksanakan percobaan program dan menilai sejauhmana program yang kita susun itu tercapai keberhasilannya.
8. Jika program yang telah disusun kurang tercapai maka perlu dilakukan revisi.

Selain itu guru dalam penerapan metode pembelajaran harus mampu memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dimana metode merupakan salah satu bentuk interaksi guru dengan siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang baik haruslah sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu metode apapun yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Majid (2006:136) mengemukakan bahwa yang harus diperhatikan guru dalam KBM adalah:

1. Berpusat kepada anak didik (*student oriented*).

Guru harus memandang anak didik sebagai sesuatu yang unik, tidak ada dua orang anak didik yang sama, sekalipun mereka kembar. Satu

kesalahan jika guru memberlakukan mereka secara sama. Gaya belajar (*learning style*) anak didik harus diperhatikan.

2. Belajar dengan melakukan (*learning by doing*).

Supaya proses belajar itu menyenangkan, guru harus menyediakan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan apa yang dipelajarinya, sehingga ia memperoleh pengalaman nyata.

3. Mengembangkan kemampuan social

Proses pembelajaran dan pendidikan selain sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi social (*learning to live together*).

4. Mengembangkan keingintahuan dan imajinasi

Proses pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin tahu anak didik. Juga mampu memompa daya imajinatif anak didik untuk berpikir kritis dan kreatif.

5. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah

Proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh guru bagaimana merangsang kreativitas dan daya imajinasi anak untuk menemukan jawaban terhadap setiap masalah yang dihadapi anak didik.

Variasi penggunaan metode pengajaran harus dilakukan. Adapun bentuk metode tersebut antara lain; metode ceramah, tanya jawab, tulisan, diskusi, pemecahan masalah (*problem solving*), kisah, perumpamaan, pemahaman dan penalaran, perintah berbuat baik dan saling menasehati, suri teladan, pemberian motivasi, praktik, karyawisata, pemberian ampunan dan bimbingan, kerjasama dan berbagai metode lainnya. Dengan maksud metode ini dapat melengkapi kebutuhan peserta didik dalam belajar.

Adapun hal lain yang harus dibenahi untuk kemajuan UN agar tidak bernuansa akademik saja adalah pengelolaan lingkungan kelas dan pengembangan sumber belajar dan bahan ajar. Hal ini perlu mendapat perhatian karena lingkungan yang belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan factor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri

bagi proses pembelajaran, sebaliknya iklim belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan.

Selain itu sumber belajar dan bahan ajar harus tersusun dengan baik. Sumber belajar akan jadi bermakna bagi peserta didik maupun guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Selain itu bahan ajar merupakan segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru/instructor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru/instructor untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.

Selanjutnya tentang kurikulum baru yang ada sekarang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) haruslah dikembangkan dengan baik dalam meningkatkan UN. Sehingga tidak ada kontroversi dengan pelaksanaan UN. Kurikulum yang harus dikembangkan hendaklah dengan penetapan visi masa depan yang disesuaikan dengan filsafat kurikulum, sehingga pada gilirannya standar kurikulum yang dikembangkan tersebut difokuskan pada kualitas pendidikan yang harus dikembangkan. Kerangka pengembangan kurikulum tersebut harus memuat tujuan sebagai sasaran kualitas peserta didik yang diharapkan, materi yang tertuang dalam silabus maupun bahan ajar, proses dalam kegiatan belajar dan mengajar, evaluasi untuk mengukur kemajuan belajar, dan pedoman pelaksanaan yang dipandang dapat diimplementasikan dengan baik dan benar sesuai standar yang ditentukan.

Langkah pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan kurikulum berbasis kemampuan dasar yang akan menjadi arah kurikulum sekolah di Indonesia masa depan, pada hakekatnya mendasarkan pada standar tentu sesuai dengan yang diharapkan. Standar ini dapat berlaku secara nasional serta dapat berlaku di daerah masing-masing.

Selanjutnya kebudayaan yang baik juga turut menjadi kesuksesan keberhasilan pendidikan. Dalam hal ini setiap teori kebudayaan yang ada punya pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Dapat dilihat contoh

yang dikemukakan oleh Kneller dalam Manan (1989:45) bahwa pengikut aliran superoganis memandang bahwa pendidikan merupakan proses yang digunakan suatu masyarakat untuk mengendalikan dan membentuk individu sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai dasar suatu kebudayaan.

Harus diyakini bahwa setiap pendidikan formal atau informal merupakan proses yang meletakkan generasi baru di bawah pengendalian sebuah system budaya. Karena kebudayaan menentukan perilaku anggota-anggotanya, maka kurikulum mesti dikembangkan dari kajian langsung nilai-nilai dasar kebudayaan yang dimanifestasikan dalam gagasan-gagasan, sikap-sikap, dan keterampilan-keterampilan.

Bagaimanapun kebudayaan tidak akan dapat dipisahkan dengan kemajuan pendidikan. Kadangkala perencanaan pendidikan sudah matang, namun karena budaya yang dimiliki masyarakat masih kental dengan nuansa yang kurang mendidik maka akan mengalami kesulitan dalam memajukan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan dapat berperan sebagai sumber perubahan kebudayaan dan sebagai agen untuk mengontrol kebudayaan.

Bila dikaitkan dengan UN maka akan sulit rasanya mencapai hasil yang maksimal. Dimana bila kita lihat budaya bangsa Indonesia yang kurang mau berusaha, malas belajar maka UN masih perlu perbaikan-perbaikan.

Jadi pada dasarnya kalau kita ingin UN berhasil dengan baik, maka seluruh aspek yang melingkupi UN tersebut harus dibenahi terlebih dahulu.

BAB III

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan Ujian Nasional (UN) banyak factor yang harus diperhatikan. Jangan jadikan UN hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan akademik semata. Tapi berikan seluruh kompetensi yang sesuai dengan perwujudan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003.

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam menyukseskan UN. Guru harus meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan baik agar UN dapat diselenggarakan dengan baik tanpa ada kecurangan. Guru harus meningkatkan kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Termasuk pengelolaan lingkungan kelas yang menyenangkan harus diterapkan dengan berbagai sumber belajar dan bahan ajar yang tersedia.

Budaya pendidikan yang bermutu harus terapkan agar tetap menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan bernilai. Budaya akan dapat membentuk pendidikan semakin baik dan budaya akan dapat dikontrol dengan adanya pendidikan.

B. Saran

Agar kebijakan UN dapat berjalan dengan lancar maka perlu peranan penting semua pihak. UN bukan merupakan perkara mudah, UN yang professional dan bernilai hanya akan dapat terlaksana dengan adanya kerjasama semua pihak. UN tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang terkait dan dukungan masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaan UN akan berhasil bila seluruh komponen yang menyelimuti UN dapat ditata dengan baik, terstruktur dan bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. 2006. Perencanaan Pembelajaran. Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Imran Manan, PH. D. 1989. Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan. Jakarta: Depdikbud.
- Undang-undang No. 20/2003. Sistem Pendidikan Nasional
- Prof. Dr. Umar Tirtarahardja dan Drs. S. L. La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarat: PT Rineka Cipta.